

## DAFTAR PUSTAKA

- Bisnis.com. 2016. KUR Jasa Konstruksi: Kontraktor Mulai Risau. 5 September. Halaman Infrastruktur. Jakarta.
- CNNIndonesia.com. 2016. Takut Diperiksa Pajak, Nasabah BCA Banyak Tutup Kartu Kredit. 17 Mei. Halaman Ekonomi. Jakarta.
- Detik.com. 2017. Ditjen Pajak: Tak Perlu Khawatir Diperiksa Kecuali Memang Nakal. 16 Mei. Halaman detikfinance. Jakarta.
- Judisseno, R. K. 2005. *Pajak & Strategi Bisnis*. Edisi Revisi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Liputan6.com. 2016. OPINI: Panama Papers, Salahkah WNI Taruh Uang di Luar Negeri. 08 April. Halaman Bisnis. Jakarta.
- Pohan, C.A. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sukardji, U. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Susanto, H. 2012. *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>. 22 Juni 2017 (19.21).
- Waskita.co.id. 2013. Kontraktor Minta Suku Bunga Kredit di Bawah 10%. 20 Februari. Halaman Berita Waskita. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 *Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor*

*dan Melaporkan PPN atau PPN dan PPn BM serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya.* 7 Juni 2012. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2012 *Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.* 22 November 2012. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2014 *Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.* 20 Juni 2014. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 *Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.* 22 Maret 2016. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 *Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.* 8 Mei 2017. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.* 2 Agustus 2000. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2013 *Perubahan Atas PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa PPN*. 12 April 2013. Jakarta.

Pengumuman Nomor 4 Tahun 2016 *Kewajiban Pelaporan Pajak secara Elektronik bagi Pengusaha Kena Pajak Pengguna e-faktur*. 27 April 2016. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2012 *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya*. 16 Agustus 2012. Jakarta.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 45 Tahun 2012 *Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN atau PPN dan PPn BM serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2012*. 27 September 2012. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 *Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN*. 12 Maret 2001. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 *Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang*. 2 Januari 2013. Jakarta.

Surat Edaran Dirjen Perpajakan Nomor 6 Tahun 2016 *Kebijakan Pemeriksaan*. 26 Februari 2016. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 *Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 31 Maret 2010. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 122 Tahun 2006 *Jangka Waktu Penyelesaian Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 15 Agustus 2006. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2012 *Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak*. 10 September 2012. Jakarta.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 754 Tahun 2001 *Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan*. 26 Desember 2001. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. *Tata Cara Pemeriksaan*. 7 Januari 2013. Jakarta.